

## RELEVANSI STANDAR AKUNTANSI UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA: KEBUTUHAN ATAS KEBERLANGSUNGAN ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA DI TENGAH KRISIS EKONOMI

Ruswan Nurmadi

Universitas Harapan Medan  
[ruswannurmadi@yahoo.com](mailto:ruswannurmadi@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities (SAK - EMKM) in Indonesia are absolutely necessary. With SAK - EMKM, MSME actors can compile a financial report that can describe the actual situation of the business situation carried out by MSME players. By having a financial reporting, MSME actors can see whether their business is sufficient with their own capital or must be supplemented with outside capital, such as loans from banks. Therefore, having a standardized financial reporting is a must because it is a requirement for banks to obtain business loans. This research is a literature study to see the relevance of Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities in Indonesia for the sustainability of Micro, Small and Medium Entities in Indonesia amid the Economic Crisis.*

**Keywords:** *Financial Accounting Standards for Micro, Small and Medium Entities, MSME*

### PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) selalu menjadi fenomena tertentu. Bagaimana EMKM dapat berkembang pada suatu Negara hingga peranan EMKM dalam perekonomian suatu Negara, merupakan fenomena tersendiri di dunia perekonomian. Permasalahan umum yang dihadapi para pelaku EMKM adalah bagaimana agar dapat mengembangkan usahanya, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga dapat berkembang.

Untuk Indonesia sendiri, perkembangan EMKM sangat cepat dan memberikan kontribusi sangat tinggi untuk perekonomian Negara (www.liputan6.com, 2018). Hal ini membuat Pemerintah Indonesia memberikan perhatian tersendiri untuk EMKM, terutama pada pendanaan EMKM. Aturan-aturan tertentu mulai ditetapkan dengan tujuan agar EMKM di Indonesia dapat bertahan, berkembang dan akhirnya unggul bersaing dengan industri sejenis. Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK - EMKM) mulai

diterapkan. SAK - EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK - EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) ([www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id), 2018).

Pada saat krisis ekonomi 1997, hal utama yang menjadi permasalahan adalah runtuhnya perekonomian yang menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Pengangguran dan hilangnya mata pencaharian mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Bank Dunia bekerjasama dengan *Ford Foundation* dan Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian (Watterberg dkk, 1999). Struktur perekonomian Indonesia pada masa tersebut yang sebagian besar merupakan usaha dengan skala besar yang membutuhkan modal besar untuk operasionalnya, langsung terpuruk seiring

dengan terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, industri EMKM mulai mendapat perhatian besar oleh Pemerintah karena industri EMKM membuktikan dapat bertahan hidup pada krisis moneter tahun 1997. EMKM lebih mudah untuk dijalankan karena tidak membutuhkan modal terlalu besar dan tidak membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang besar pula. Masalah yang kemudian muncul adalah, banyak EMKM yang kesulitan untuk berkembang, apalagi untuk unggul bersaing dengan industri sejenis.

Pada saat ini, dimulai dari awal tahun 2020, dengan adanya Pandemi Covid-19, yaitu peristiwa menyebarnya Penyakit virus korona 2019, di seluruh dunia untuk semua Negara. dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia ([www.who.int](http://www.who.int), 2020), banyak sektor perekonomian yang terkena dampak, termasuk sektor EMKM. Banyak pelaku EMKM yang mengalami penurunan omset penjualan karena penurunan jumlah pembeli. Hal ini disebabkan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah

kepada masyarakat agar tetap berdiam di rumah, untuk menghadapi pandemi yang tengah terjadi. Hal ini membuat para pelaku EMKM harus menerapkan strategi-strategi baru agar dapat bertahan dan meningkatkan kembali omset penjualan mereka agar dapat memperoleh pendapatan yang diinginkan, diantaranya melakukan penjualan secara *E-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta menjalin hubungan baik dengan konsumen atau menjalin hubungan pemasaran - pelanggan (Alvin, 2020).

Apakah aturan yang ditetapkan Pemerintah untuk mengatur keberlangsungan EMKM di Indonesia cukup relevan dengan keadaan pada saat ini? Artikel ini menyorot relevansi Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dan hubungannya terhadap kebutuhan atas Keberlangsungan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia di tengah krisis ekonomi.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana relevansi Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia bila dikaitkan dengan kebutuhan atas Keberlangsungan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia di tengah krisis ekonomi.

## **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk melihat relevansi Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia bila dikaitkan dengan kebutuhan atas Keberlangsungan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia di tengah krisis ekonomi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK - EMKM) merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah yang dirancang khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI ([iaiglobal.or.id](http://iaiglobal.or.id)).

Tujuan disusunnya SAK EMKM adalah agar para pelaku EMKM memiliki standar yang sama dalam pelaporan keuangan dan tidak kesulitan dalam menerapkannya. SAK EMKM disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pelaporan keuangan bagi EMKM, sehingga komponen laporan keuangan yang disajikan atau diwajibkan untuk dilaporkan juga lebih sedikit dibandingkan standar akuntansi lainnya, seperti SAK berbasis *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan perusahaan lebih besar yang menggunakan SAK - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Novietta dan Nurmadi, 2020).

## **Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM)**

Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM), atau juga disebut sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), menurut peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 – Rp 300.000.000 (dengan syarat tertentu). Untuk usaha kecil, kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000 (dengan syarat tertentu). Untuk usaha menengah, memiliki penjualan sebesar Rp 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar.

Dapat dilihat, apabila dilihat dari kekayaan bersih, EMKM merupakan jenis industri yang populer di kalangan masyarakat karena tidak membutuhkan permodalan sangat besar dibanding misalnya membuka jenis usaha dalam bentuk perusahaan besar misalnya. Hal ini yang menyebabkan peningkatan EMKM di banyak Negara sangat pesat, terutama di negara-negara perekonomian berkembang

## Kerangka Berpikir



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Dari kerangka berpikir di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini melihat apakah Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dapat memenuhi kebutuhan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) untuk memiliki suatu standar yang dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan yang dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal, untuk keberlangsungan EMKM, apabila dikaitkan dengan situasi perekonomian saat ini .

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain. Studi literatur dipergunakan pada penelitian ini untuk melihat relevansi Standar Akuntansi untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia bila dikaitkan dengan kebutuhan atas Keberlangsungan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia di tengah krisis ekonomi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang belum mampu menyediakan laporan keuangan sesuai standar. Sementara itu, akuntan profesional di Indonesia belum dapat memberikan pendampingan yang memadai terkait pemahaman akuntansi (Hanifati dan Leo, 2019). Secara umum terlihat bahwa banyak pelaku UMKM belum menerapkan penyusunan suatu laporan keuangan sesuai standar untuk usahanya. Hal ini membuat para pelaku

UMKM juga menghadapi permasalahan seperti bagaimana cara memperoleh pinjaman dana usaha dari perbankan untuk menunjang operasional usahanya (Novietta dan Nurmadi, 2020).

Dalam memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui telah mengeluarkan standar pelaporan bagi UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK - EMKM). SAK EMKM, yang lebih sederhana, diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk menyusun pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal, termasuk di dalam memperoleh pendanaan untuk usahanya. Akan tetapi, dikutip dari kompas.com (2018), implementasi SAK EMKM masih menjadi pekerjaan yang tidak mudah di kalangan UMKM karena masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang baik.

Peran tenaga akuntan sangat besar dalam membantu UMKM mempersiapkan

laporan keuangan yang kredibel dan sesuai standar. Akan tetapi, tentunya para pelaku UMKM sendiri juga harus menyadari pentingnya menyusun suatu pelaporan keuangan sesuai standar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah dapat menggandeng akademisi di dunia pendidikan untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang berkaitan tentang pelaporan keuangan UMKM misalnya. Pelaku UMKM juga dapat meminta pelatihan akuntansi pada dinas terkait, dan hal-hal lainnya. Hanifati dan Leo (2019) menyatakan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *International Federation of Accountants*, (2016) menyatakan Kantor Jasa Akuntan (KJA) dianggap pelaku UMKM menjadi lembaga jasa konsultasi dan penyedia informasi keuangan yang mampu membantu pelaku UMKM dalam kebutuhan untuk menyediakan pelaporan keuangan. Agbaje et. al (2017) menyatakan bahwa usaha skala kecil dan menengah harus didorong untuk mengadopsi sistem akuntansi yang baik. Di sisi lain, sistem akuntansi harus memiliki

relevansi dengan ukuran dan kebutuhan usaha kecil dan menengah, termasuk jasa akuntan. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus memiliki pelaporan keuangan yang sesuai standar, dan apabila diperlukan, juga memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Ojala dkk (2014) memberikan pendapat bahwa pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan yang telah diaudit akan lebih mudah untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam usahanya.

Saat ini, pada masa pandemi, terjadi penurunan permintaan barang oleh konsumen, termasuk konsumen yang selama ini menjadi target usaha para pelaku UMKM. Pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan pada sektor pariwisata dan kuliner serta hal-hal lainnya selama masa pandemi, berdampak kepada sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM harus menyusun ulang struktur modalnya agar usahanya tidak sampai gulung tikar. Di sisi lain, pelaku UMKM dapat memanfaatkan *e-commerce*, mengingat sebagian besar masyarakat memilih untuk

bekerja atau lebih banyak beraktivitas di rumah, sehingga transaksi secara daring (dalam jaringan/*online*) lebih banyak terjadi dibanding transaksi secara luring (luar jaringan/*offline*). Apapun keadaannya, tentu saja terbukti bahwa UMKM harus memiliki suatu pelaporan keuangan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Hanya dengan memiliki pelaporan keuangan yang baik, pelaku UMKM dapat mengetahui secara lengkap tentang keadaan usahanya sehingga pelaku UMKM dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperthankan dan mengembangkan usahanya di tengah krisis ekonomi yang terjadi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK – EMKM) di Indonesia mutlak diperlukan. Dengan adanya SAK – EMKM, pelaku UMKM dapat menyusun

suatu pelaporan keuangan yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari keadaan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM.

- Keberlangsungan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia di tengah krisis ekonomi bergantung pada pelaku UMKM itu sendiri. Dengan memiliki suatu pelaporan keuangan, pelaku UMKM dapat melihat apakah usahanya cukup dengan modal sendiri atau harus ditambah dengan modal dari luar, seperti pinjaman dari perbankan. Salah satu syarat untuk memperoleh tambahan modal dari perbankan adalah memiliki suatu pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai standar.

### Saran

Dari studi literatur yang dilakukan, maka diharapkan :

- Adanya kesadaran dari diri pelaku UMKM sendiri terhadap pentingnya memiliki suatu pelaporan keuangan.

- Lebih ditingkatkannya sosialisasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK – EMKM) di Indonesia oleh Pemerintah melalui dinas atau badan terkait, termasuk sosialisasi tentang pinjaman untuk UMKM oleh Perbankan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agbaje, Abdul-Ganiyy A, Bojuwon, Mustapha, dan Abidoeye, Mobolaji Kafayat. Impact of Accounting and Audit Service for Small and Medium Scale Enterprises' Performance. *Osogbo Journal of Management (OJM)*, 2017 2(2), 21 – 43.
- Alfin, A. (2020). Analisis Strategi UMKM dalam Menghadapi Krisis di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1543-1552.  
<https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.280>
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Hanifati, Raditya Shinta dan Leo, Lianny. (2019). Upaya Meningkatkan



- Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik. *JPAK : Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 2. Pp : 65-80.
- Novietta, Liza dan Nurmadi, Ruswan. (2020). Identifikasi Tingkat Pengetahuan Pengusaha Kecil terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana di Lingkungan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*. Volume 3, Nomor 2, 2020, 142-149. eISSN : 2599-1175, ISSN : 2599-0136.
- Novietta, Liza dan Nurmadi, Ruswan. (2020). JAKK (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer). Volume 3 No. 1/ Mei, e- ISSN: 2623-2596. Pp : 42-49.
- Ojala, Hannu, Niskanen, Mervi, Collis, Jill dan Pajunen, Kati. (2014). Audit Quality and Decision Making in Small Companies. *Managerial Auditing Journal*, September 2014, DOI: 10.1108/MAJ-08-2014-1063.
- Watterberg, A., S. Sumarto, L. Pritchett. 1999. "A National Snapshot of the Social Impact of Indonesia's Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 35, No 5.
- International Federation of Accountants. (2016). The Role of Smps in Providing Business Support to SMES New Evidence. *International Federation of Accountants*.  
[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id) , diakses tanggal 1 Juni 2020
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  
<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses tanggal 3 Juni 2020.
- <https://money.kompas.com/read/2018/08/30/144531526/masih-banyak-pelaku-umkm-buta-akuntansi>, diakses tanggal 7 Juni 2020.